



Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah

Andi Adi Prabowo Putra Bakti¹, Nasrullah Bin Sapa²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<mailto:andiputra21111995@gmail.com>¹, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah (661-750 M), yang merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh khalifah Rasyidin, diikuti oleh transisi menuju sistem monarki dibawah Dinasti Umayyah. Dibawah kepemimpinan khalifah-khalifah seperti Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Aziz, berbagai kebijakan ekonomi yang inovatif diterapkan, termasuk reformasi fiskal, sistem perpajakan yang adil, dan pengelolaan zakat yang optimal. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkuat perekonomian, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui pendekatan kualitatif yang dilihat dari data historis dan analisis literatur, penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem ekonomi yang dikembangkan pada masa Dinasti Bani Umayyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran dan kebijakan ekonomi pada masa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peradaban Islam dan dapat menjadi referensi dalam konteks ekonomi saat ini. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah lebih berorientasi pada implementasi kebijakan praktis untuk mengelola kekayaan negara yang melimpah akibat ekspansi wilayah, daripada perumusan teori ekonomi yang sistematis. Praktik ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa ini menjadi landasan penting bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang lebih terstruktur di masa Dinasti Abbasiyah selanjutnya.

Kata Kunci: Bani Umayyah, Kebijakan Ekonomi, Khalifah

1. Pendahuluan

Islam mulai memberi pengaruh kepada dunia sejak agama Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, tampuk kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang sahabat yang dikenal dengan integritas dan kebijaksanaannya. Beliau kemudian menyandang gelar khalifah sebagai pemimpin spritual dan politik umat Islam, yang menandai dimulainya era kekhalifahan Islam (Saputra & Sirajuddin, 2025). Abu bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah pertama dalam rangkaian empat pemimpin yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai Khalifah Rasyidin atau para pemimpin yang mendapat petunjuk (Yani, 2022). Berakhirnya kekuasaan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifa menjadi awal terbentuknya sebuah sistem pemerintahan yang baru bercorak monarki absolut atau kerajaan turun temurun sehingga sehingga terbentuklah Dinasti Bani Umayyah (Maghfuroh et al., 2023).

Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat pada masa kepemimpinan bani Umayyah. Masa Bani Umayyah dikenal sebagai suatu pemerintahan zaman agresif. Hal ini dikarenakan perhatiannya terfokus pada persoalan perluasan wilayah dan penaklukan yang sempat terhenti sejak zaman kedua khulafur Rasyidin (Maghfuroh et al., 2023). Sehingga peradaban Islam memberi pengaruh yang besar kepada dunia pada saat itu. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai peradaban, ilmu pengetahuan, politik dan pemerintahan, sains dan teknologi termasuk di bidang ekonomi (Risma et al., 2024).

Pada masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah memiliki 14 khalifah, tetapi hanya ada tiga khalifah yang secara peran memiliki kontribusi besar kemajuan dan perkembangan administrasi dan perekonomian yang dianggap mampu menyejahterakan masyarakat pada waktu itu, mereka adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan mereka terjadi transformasi yang optimal dalam banyak hal. Pada masa itu *baitul mal* memiliki peran sangat penting, hal itu karena penaklukan yang dilakukan sangat luas di arah barat sampai Afrika utara Andalusia dan ke Timur sampai India dan perbatasan Cina, daerah yang terkenal dengan kekayaan alamnya, sehingga kas negara begitu melimpah (Indah et al., 2025). Selain itu, kemajuan di bidang lain turut berkontribusi, termasuk ekonomi, yang ikut memperkuat peradaban Islam pada masa

Dinasti Bani Umayyah. Para khalifah juga menerapkan berbagai peraturan ekonomi pada masa itu, yang menjadi bagian penting dari kebijakan yang berpengaruh besar (Zuhroh, 2023).

Masa kekhalifahan Bani Umayyah (661-750 M) menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi Islam. Pada masa ini, sistem ekonomi yang berbasis syariah mulai diterapkan, melibatkan kebijakan Fiskal, Perdagangan, Reformasi moneter, dan pengelolaan Sumber Daya Alam (Ismail & Arif, 2025). Pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M) menjadi fondasi sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan (Saputra & Sirajuddin, 2025). Studi tentang ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam diimplementasikan dalam konteks pemerintahan yang kompleks dan multikultural (Nuha et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam pada masa Dinasti Bani Umayyah. Melalui analisis ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem ekonomi Islam yang dikembangkan pada masa Dinasti Umayyah dan relevansinya dengan pengembangan ekonomi Islam kontemporer.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui analisis literatur yang membahas ekonomi pada masa dinasti Bani Umayyah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, yang bertujuan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis. Proses ini melibatkan pengumpulan, evaluasi dan dianalisis guna untuk memperoleh hasil yang baik.

3. Hasil Dan Pembahasan

Sejarah Pemerintahan Bani Umayyah

Dinasti Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah, adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin (Harahap, 2020). Dinasti Bani Umayyah dimulai pada tahun 661 M ketika Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengambil alih jabatan khalifah setelah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berakhir. Transisi ini menandai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Islam, dari model yang relatif demokratis menjadi sistem monarki hereditas (Nuha et al., 2025).

Kekhalifahan Umayyah memerintah dari tahun 661 hingga 750 M di wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari tahun 756 hingga 1031 M di Kordoba, Spanyol (Maghfuroh et al., 2023). Nama Dinasti Umayyah sendiri dinisbatkan kepada Umayyah bin Abd Syams bin Abdu Manaf kakek buyut dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang merupakan salah satu tokoh penting di tengah Quraisy pada masa Jahiliyah. Mu'awiyah juga menjadi Khalifah pertama dinasti tersebut (Wahab, 2023). Pada awal kepemimpinan Mu'awiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah. Ia berhasil berhasil merubah sistem pemerintahan Islam yang awalnya bersifat demokrasi menjadi monarki (kerjaan). Dimana dalam sistem kepemimpinan tersebut mencapai kesuksesan dan akhirnya membuat kepemimpinan dilakukan secara turun temurun. Hal ini dimulai ketika Mu'awiyah menyerahkan kepada seluruh rakyatnya untuk memilih Yazid sebagai pemimpin. Kemudian ia menjadikan sistem nepotisme sebagai sistem pengangkatan untuk pemilihan khalifah yang selanjutnya (Zuhroh, 2023).

Kekuasaan dinasti Umayyah hampir 1 abad lamanya, tepatnya ialah selama 90 tahun berkuasa, dalam kalender masehi di mulai dari tahun 661-750 M. Selama berdirinya dinasti Umayyah ia memiliki pemimpin sebanyak 14 khalifah, adapun diantara pemimpin atau khalifa pada masa dinasti Umayyah adalah sebagai berikut (Hidayatulloh & Khusnuddin, 2024);

1. Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680 M)
2. Yazid bin Muawiyah (680-683 M)
3. Muawiyah bin Yazid (683-684 M)
4. Marwan bin Hakam (684-685 M)
5. Abdul Malik bin Marwan (685-705 M)
6. Walid bin Abdul Malik (705-715 M)
7. Sulaiman bin Abdul Malik (715-717 M)
8. Umar bin Abdul Aziz (717-720 M)
9. Yazid bin Abdul Malik (720-724 M)
10. Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M)
11. Walid bin Yazid (743-744 M)
12. Yazid bin Walid (744 M)
13. Ibrahim bin Walid (744 M)
14. Marwan bin Muhammad (744-750 M)

Daulah Umayyah berakhir setelah kekalahan Marwan bin Muhammad pada tahun 750 M yang menandai awal berdirinya Daulah Abbasiyah

Dinasti Bani Umayyah sangat sukses pada masa pemerintahannya, terbukti dengan berbagai kemajuan yang diraihnya. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana Umayyah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya Andalusia. Diantaranya dijelaskan beberapa keberhasilan Bani Umayyah di Andalusia (Zein, 2022):

1. Pembangunan infrastruktur: Dinasti Umayyah melakukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, menggunakan seni arsitektur yang terinspirasi oleh budaya Yunani-Romawi dan Persia. Termasuk pembangunan jalan, masjid, dan bangunan umum lainnya yang mendukung perkembangan peradaban.
2. Perluasan wilayah: Bani Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam, menaklukkan berbagai pusat peradaban kuno seperti Yunani-Romawi, Persia, Mesir, dan India. Hal ini tidak hanya memperluas pengaruh Islam, tetapi juga memperkaya budaya dan ilmu pengetahuan yang ada.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan : Terjadi perkembangan pada banyak cabang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama ('Ulumuddin) dan kajian khazanah keilmuan peradaban terdahulu. Hal ini menunjukkan adanya kuatnya tradisi pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam
4. Stabilitas politik: Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah merupakan perkembangan politik baru dalam sejarah peradaban Islam pasca era Khulafaurraiyidun. Kebijakan yang diterapkan pemerintah mempunyai dampak positif terhadap perkembangan masyarakat.
5. Peningkatan keadilan sosial dan sistem perpajakan: Khalifah Umar mengutus para pengkhotbah untuk berdakwah di berbagai daerah, yang membantu memperkuat eksistensi umat Islam dan peradaban yang menjadi ciri Islam.
6. Warisan untuk Dinasti Abbasiyah : Kesuksesan yang diraih pada masa Bani Umayyah menjadi tumpuan kejayaan Dinasti Abbasiyah, dengan banyaknya bermunculan kebudayaan-kebudayaan Islam di berbagai daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Bani Bani Umayyah

Kebijakan Ekonomi Pada Masa Bani Umayyah

Di era dinasti Bani Umayyah menurut K. Ali dalam buku *A Study of Islamic History* mengatakan sumber pendapatan ekonomi dinasti Umayyah adalah *The Land Tax, The poll Tax on non Muslim (Jizyah), The poor rates, customis and excise dusties, tributes paid under treaties, the fifth of spolis of war (Ghanimah), Fay, Additional imports, persents of festival*. Sektor ekonomi pastinya mengalami pasang surut yang tentunya selalu terjadi di setiap zaman kepemimpinan. Di masa dinasti Umayyah adapun hal-hal yang dilakukan dalam sektor ekonomi antara lain :

Pertama, Menciptakan Mata Uang. Abdul Malik bin Marwan menyusun rencana untuk menghasilkan uang yang dapat digunakan umat Islam selama kekhalifahan. Carl Brockelmann mengklaim bahwa pada tahun 693, khalifah Abdul Malik bin Marwan memilih agar Damaskus memproduksi mata uangnya sendiri. Tahun berikutnya, Hajjaj melakukan hal yang sama. Konsekuensinya, masyarakat Arab mulai mengakui sistem perhitungan. Konsep ini digunakan di Yaman, Suriah, dan Irak.

Kedua, Khalifah Abdul Malik, yang memiliki pengaruh Fajri al., *Potret Peradaban Islam ...155* signifikan terhadap perekonomian dinasti tersebut, bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi ini. Sebelum penerapan kebijakan ini, dirham dan dinar, uang Roma dan Persia, masih digunakan sebagai alat tukar. Pentingnya persatuan dan kesatuan Umat Muslim di wilayah yang begitu luas tidak diragukan lagi akan berkurang dengan tidak adanya mata uangnya sendiri. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam di wilayah itu, secara implisit dapat dikemukakan bahwa ilmu khalifah memiliki keutamaan yang penting.

Ketiga, Pengaktifan Baitul Mal. Dinasti Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memproklamkan dan menyerahkan semua harta pribadi dan keluarga yang tidak dimiliki. wajar bagi umat Islam melalui Baitul Maal. Untuk menjalankan Baitul Mal dan memberikan uang kepada yang berhak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berusaha menggunakan dana haram. Orang-orang dilindungi oleh Khalifah Umar, yang juga menaikkan taraf hidup mereka, sehingga kemakmuran mereka. Dia menerapkan kebijakan seperti menghapus pajak bagi umat Islam, menyeimbangkan ukuran dan berat, menghapus pajak cukai dan kerja paksa, antara lain. Ia juga mengurangi beban pajak orang Kristen dari 2000 buah menjadi 200 buah. Orang tidak mau lagi menerima zakat karena banyak tindakan Umar bin Abdul Aziz yang mengangkat kualitas hidup mereka. Namun kondisi ini tidak dapat bertahan lama. Ini diakibatkan beberapa penguasa melakukan keserakahannya sehingga meruntuhkan sendi-sendi baitul Maal. Dan ini terjadi hingga masa Kekhalifahan Bani Abbasiyah. (Hatmansyah, Juni 2018). Keempat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Dengan penaklukan yang begitu besar di bawah ikat pinggangnya selama era Umayyah, dia dapat memanfaatkan potensi ekonomi penaklukan tersebut. Selain itu, mereka mampu mengirimkan sejumlah besar budak ke Dunia Islam. Dengan menggunakan tenaga kerja, orang-orang Arab dapat mengeksploitasi negara-negara seperti Mesir, Suriah, dan Irak sambil juga hidup dari tanah yang telah mereka taklukkan dan mengubahnya menjadi kelas pemungut pajak. Bani Umayyah tidak hanya terlibat dalam ekstraksi sumber daya alam; mereka juga berusaha untuk mengembangkan daerah yang telah mereka taklukkan.

Hal ini terlihat dari tindakan gubernur Irak saat itu, al-Hajjaj bin Yusuf. Dia berhasil mendorong perdagangan, memulihkan kanal Efrat dan Tigris, dan meningkatkan bobot, takaran, dan sistem moneter.

Akibatnya, potensi ekonomi negara-bangsa yang telah terwujud serta sejumlah besar budak dari negara-bangsa yang telah terwujud telah berkontribusi pada perekonomian periode Daulah Bani Umayyah. (Nur, 2015) Pada masa Bani Umayyah, Umar bin Abdul Azis mewujudkan gagasan negara kesejahteraan, juga disebut bangsa yang makmur. Umar memiliki rencana baru untuk mengubah cara hidup masyarakat. Salah satu buktinya adalah tidak seorang pun boleh mendapatkan zakat karena tersedia cukup makanan untuk semua orang di Kota (Nadila et al., 2023). Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis, kebijakan yang berpihak kepada rakyat berhasil menghilangkan kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata (Nuha et al., 2025).

1. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Ketika pemerintahan Bani Umayyah berada di tangan Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685-705 M), kondisi dinasti Umayyah pada periode ini relatif stabil. Keadaan ini terjadi karena dukungan al-hajjaj, seorang panglima penakluk Mekkah yang bertangan besi, yang memimpin wilayah timur yang sangat berbahaya daari segi keamanan. Kondisi stabilitas pada masa ini mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi yang signifikan, termasuk pembangunan jalan, sistem irigasi, dan fasilitas publik. Kemajuan infrastruktur ini mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan industri, yang pada akhirnya meningkatkan perdangan pada wilayah-wilayah seperti India dan Asia tenggara (Indah et al., 2025). Reformasi fiskal penting lainnya termasuk;

- 1) **Standardisasi Mata Uang ;** Pada tahun 77 H Abdul Malik bin Marwan menciptakan mata uang dalam bentuk dinar (emas) dan dirham (perak) dengan model Islami dan tulisan dalam aksara Kufi. Abdul Malik mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang. Pada masa kepemimpinannya Abdul Malik menghukum orang-orang yang memalsukan uang dengan hukuman cambuk, hingga pada akhirnya Dinar dan Dirham pada masa Dinasti Bani Umayyah terkenal halus, akurat dan murni (Fadilla, 2019).
- 2) **Sistem Perpajakan ;** Pada masa Dinasti Umayyah, sistem perpajakan mengalami sejumlah modifikasi yang signifikan. Pada saat itu masa pemerintahan Umar bin Abdul Azis, ia melakukan kebijakan dimana pajak tanah (kharaj) dikenakan kepada seluruh pemilik tanah untuk dimasukkannya ke dalam baitul mal tanpa memandang agama. Ia juga menerapkan sebuah kebijakan dibidang fiskal, kebijakan fiskal yang diterapkan pada masa itu yakni dengan mengurangi besaran pajak yang dipungut dari orang Nasrani. Sementara pajak kepala (jizyah) yang masih dipungut dari orang yang telah memeluk agama Islam diantara mereka dihentikan. Dengan demikian kebijakan ini mendorong umat Nasrani berbondong-bondong masuk Islam (Al-Faruq et al., 2024).

2. Sistem Administratif dan Institusional

Pada masa Bani Umayyah dicirikan dengan keberhasilan dalam membangun sebuah kerajaan yang kuat dan makmur, yang dicapai dibawah kepemimpinan khalifah-khalifah, termasuk Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang mengimplementasikan sejumlah inovasi sistem administrasi (Nuha et al., 2025). Pada masa pemerintahan Mu'awiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos (*al-barid*) serta seluruh fasilitas pendukungnya. mencetak mata uang, mengembangkan jabatan *qadi* (hakim) sebagai jabatan profesional. Para *qadi* di masa itu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara sehingga mereka bebas memutuskan sesuatu termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan para pejabat tinggi Negara (Kirani et al., 2023).

3. Konsep Negara Kesejahteraan

Puncak kegemilangan kebijakan ekonomi pada masa Bani Umayyah datang kembali pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Azis. Semua itu merupakan bukti bahwa Khalifa Umar merubah dan menerapkan beberapa kebijakan baru yang lebih produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusumastuti & Ghozali, 2019). Kebijakannya meliputi;

- 1) **Manajemen Zakat ;**
Pada masa kekhalfahan Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengentasan kemiskinan di negerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal membuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin di negerinya (Ruslan & Marasabessy, 2017).
- 2) **Reformasi Jizyah ;**
Pajak yang dikenakan kepada *non-Muslim (dzhimmi)* yang tinggal di wilayah kekhalfahan Islam. Pajak ini diambil sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh negara Islam, serta hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka (Samsunar et al., 2024).

3) **Reformasi Kharaj ;**

Pajak yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara. Pajak ini juga mendorong stabilitas hubungan antaragama di wilayah kekhalifahan (Ismail & Arif, 2025)

Tokoh Pemikir Ekonomi Islam Pada Mada Bani Umayyah

1) **Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan;**

Pada masa pemerintahannya, khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan mendirikan dinas beserta dengan berbagai fasilitasnya, menertibkan angkatan perang, mencetak mata uang, dan mengembangkan jabatan qadi (hakim) sebagai jabatan profesional. Selain itu, khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi, seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik (Huda, 2021).

2) **Khalifah Abdul Malik bin Marwan;**

Pada masa pemerintahannya, Abdul Malik bin Marwan mengusung sebuah konsep penertiban dan pengaturan yang dalam masyarakat Islam. Pada waktu itu beliau menerbitkan mata uang dan membangun pabrik sendiri yang terbuat dari emas dan perak sebagai alat tukar yang sah. Pada masa tersebut banyak orang kafir yang ingin masuk Islam, karena beliau pada waktu itu hanya mewajibkan rakyatnya untuk membayar zakat tanpa membayar pajak lainnya (Zuhroh, 2023).

3) **Khalifah Umar bin Abdul Azis**

Pada periode pemerintahan Umar bin Abdul Azis mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor zakat dan *kharaj*, ia juga menerapkan kembali kebijakan ekonomi di sawad yaitu menerapkan *jizyah* dan *kharaj* bagi dzimmi petani dan tuan tanah untuk melindungi kepemilikan tanahnya dan keselamatan jiwanya. Umar juga membebaskan pajak bagi para muallaf. Mengurangi Ekspansi kekuasaan, dan lebih fokus kepada perbaikan didalam negeri dan menghilangkan berbagai pungutan liar (Hayati, 2019).

Perekonomian masa bani Umayyah (kemajuan dan kemunduran)

Ekonomi adalah satu-satunya faktor yang paling penting dalam mempengaruhi proses membangun bangsa. Oleh karena itu, ekonomi suatu negara akan berdampak negatif pada proses pembangunan negara itu. Dibandingkan dengan disiplin ekonomi lainnya, sumbangan ke khalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi cukup sedikit. Namun, ada beberapa titik perselisihan di antara mereka mengenai ekonomi Islam. Ini termasuk perselisihan tentang prinsip-prinsip transaksi saham, murabahah, muzara'ah, dan kitab Al-Kharaj, yang ditulis Abu Yusuf selama periode Hasyim dan yang berfokus pada reformasi ekonomi. Argumen sumbangan ini diklasifikasikan sebagai argumen ekonomi yang cukup keras. Pada tahun 693M, Khalifah Abdul Malik membuat keputusan tegas untuk mencetak menggunakan uang di Damaskus. Sebaliknya, Hajjaj melakukan tindakan yang sama pada tahun berikutnya. Masyarakat Arab sudah mulai membahas sistem perhitungan. Ide ini juga dipraktikkan di Irak, Suriah, dan Yaman. Kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Abdul Malik memiliki dampak yang signifikan pada kondisi ekonomi saat ini. Seperti yang kita lihat, sebelum ini diimplementasikan, mata uang yang digunakan sebagai tukar adalah Drachma Romawi dan Dinar Persia, yang masing-masing adalah dirham dan dinar. Jika tidak ada mata uang sendiri, itu mungkin tidak akan dapat mempengaruhi nilai-nilai Muslim di daerah sekitarnya yang cukup kecil. Selama pemerintahan Abdul Malik, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan disertai dengan kekayaan negara yang menurun karena korupsi dan manajemen yang salah yang telah meningkatkan standar hidup bagi populasi. Kita dapat mengamati hal ini dengan melihat hasil panen pajak (*kharaj*) di wilayah syam syam, yang merupakan sekitar 1.730.000 dinar emas per tahun. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Hugh Kennedy: "Tidak ada keraguan bahwa pajak surplus akan dikirim ke Kementerian Keuangan di Damaskus." Penurunan komunitas Bani Umayyah juga terlihat di bawah pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Pertumbuhan ekonomi selama periode pemerintah telah mencapai kekacauan.

Setiap bagian literatur yang ada saat ini menegaskan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kepapaan dapat dibahas selama periode pemerintahan Khalifah ini. Jika kita ingin mengamati awal kemajuan ekonomi Islam, penting untuk kita menelusuri jejak perkembangan pada masa Bani Umayyah. Pada periode ini, banyak sumbangan-sumbangan pemikiran dan kebijakan ekonomi dari para khalifah pada masa dinasti Bani Umayyah. Keadaan perekonomian pada masa bani umayyah (faktor kemajuan dan kemunduran).

Secara umum kita mengenal pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, masa khulafur rasyidin, masa bani umayyah dan masa bani abbasiah. Dari masa ini adalah salah satu masa yang dianggap sebagai masa keemasan pencapaian sejarah yaitu masa dinasti bani umayyah

Kemajuan pemerintahan bani umayyah telah terjadi dari berbagai bidang salah satunya bidang ekonomi. Di bidang ini perekonomian yang membawa arah kemajuan dan juga membawa arah kemunduran. Untuk lebih

mengetahuinya bagaimana perekonomian yang membawanya kemajuan dan kemunduran, yang mana akan membagikan keadaan ekonomi yang lebih baik.

Keadaan ekonomi pada masa umayyah

Ketika pemerintahan bani umayyah di tangan khalifah Abdul Malik Ibn Marwan, kondisi dinasti umayyah yang relatif stabil. Kondisi ini terjadi karena bani umayyah mendapatkan dukungan seorang panglima yang bertangan besi, memimpin wilayah sebelah timur yang merupakan propinsi yang sangat berbahaya dari segi keamanan.

Dengan adanya kerjasama tersebut menghasilkan pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan meningkatnya anggaran pemerintahan untuk berbagai macam pekerjaan umum diantaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid berbagai propinsi dan yang terbesar dalam pembangunan Doem of the rock (qubba al sahra) diatas masjid al aqsa

Upaya pemerintahan prasarana diatas menjadikan perekonomian dapat berkembang dengan pesat dalam pertanian contohnya gandum, padi tebu, jeruk, kapas dan sebagainya. Demikian juga industri kulit dan tenun mengalami kemajuan yang cukup bagus. Hasil industri dalam bidang ekonomi dipasarkan samapai ke seluruh dunia.

Faktor Kemajuan Ekonomi Pada Masa Daulah Bani Umayyah

Selama dinasti bani umayyah memerintah kemajuan dibidang ekonomi didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mendukung kemajuan bani umayyah antara lain;

1. Kemajuan perekonomian dari perdagangansetelah daulah umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas [erdangan mendapatkan jaminan yang layak baik melalui darat maupun laut, Pada jalur darat umat islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutra menuju tiongkok guma memperlankan perdagangan mendapatkan jaminan yang layak baik jalur darat maupun laut.. Pada jalurv laut kea rah negeri belahan timur dalam mencari rempah-rempah bumbu kasturi . logam mulia . Sehingga pada saat itu menjadikan pelabuhan dagang ynog cukup ramai.
2. Kemajuan perekonomian dari sektor pertanian dan industri
3. Kemajuan perekonomian dari sektor reformasi fiskal
Selama pemerintahan Umayyah semua pemilik tanah baik yang muslim dan nonmuslim, diwajibkan membayar pajak tanah, sementara itu pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk islam secara ekonomi hal ini yang melatar belakangi berkurangnya penghasilan Negara. Namun demikian, dengan keberhasilan Umayyah melakukan penaklukan imperium Persia dan Byzantium maka sesungguhnya kemakmuran daulah ini sudah melimpah ruah.
4. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki pandangan bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah sebelum Umar, melainkan dengan mengoptimalkan kekayaan alam yang ada, dan mengelola keuangan Negara dengan efektif dan efisien. Keberhasila dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat inilah yang membuat Umar Bin Abdul Aziz tidak hanya disebut sebagai pemimpin Negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalfahannya.
5. Kemajuan perekonomian dari sektor pembuatan mata uang
Pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan (65-86H), beliau membuat kebijakan untu memakai mata uang sendiri. Pemrintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Daar idjard. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan control pemerintah, kemudian pada tahun 77H/697M, khalifah Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak islam yang khas, berisi teks islam, ditulis dengan tulisan kufi. Gambar-gambar dinar lam diubah dengan lafadz-lafadz islam seperti Allahu Ahad, Allah Baqa'. Sejak saat itulah umat islam memiliki dinar dan dirham islam sebagai mata uangnya dan meninggalkan dinar Bezantium dan dirham Kirsia.

Faktor Kemunduran Ekonomi Pada Masa Daulah Bani Umayyah

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dinasti bani umayyah telah mengalami kemunduran dan kehancuran. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan kemunduran dan kehancuran bani umayyah, antara lain :

1. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidak jelasan system pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana.

2. Pada masa kekuasaan Bani umayyah, pertentangan etnis antara suku Arab Utara (Bani Qays) dan Arabia selatan (Bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum islam, makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan mawali (non-Arab), terutama di irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah.
3. Latar belakang terbentuknya dinasti umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi yang terjadi dimasa Ali. Sisa-sisa syi'ah (para pengikut Ali) dan khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka, seperti di masa awal dan akhir maupun secara sembunyi seperti dimasa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah.
4. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibn Abd Al-Almunthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan golongan Syi'ah dan kaum Mawali yang merasa dikelasduakan oleh pemerintahan Umayyah
5. Lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup yang mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang.

Relevansi Sistem Keuangan dan Pajak pada Masa Bani Umayyah dengan Masa Sekarang

Konsep ekonomi Islam era Bani Umayyah masih relevan hingga saat ini, khususnya dalam konteks pengelolaan keuangan dan zakat. Pada masa Bani Umayyah, sistem ekonomi Islam diterapkan dengan baik dengan prinsip-prinsip dasar seperti pemerataan kesempatan, pemerataan pendapatan dan tanggung jawab publik yang merupakan prinsip-prinsip konsep ekonomi negara kesejahteraan (Maghfuroh et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya fleksibel tetapi juga adaptif menghadapi era revolusi industri 5.0. Selain itu, pada masa Umayyah juga dikenal dengan pembangunan dan perusahaan dinar dan dirham, yang menunjukkan keterampilan pengelolaan keuangan yang canggih pada masa itu.

Praktik ini dapat dijadikan contoh bagaimana sistem ekonomi Islam dapat mengelola keuangan secara efektif bahkan dalam konteks modern (Utama, 2022) Dalam konteks perpajakan, konsep ekonomi Islam era Bani Umayyah juga menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam pemungutan pajak. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah paling terkenal di era Bani Umayyah, dikenal membawa kesejahteraan bagi masyarakat melalui keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pajak (Azizah Nur Adilah, 2021). Prinsip-prinsip ini masih relevan dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan modern. Oleh karena itu konsep ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah dapat dijadikan rujukan berharga bagi pengelolaan keuangan dan perpajakan secara adil dan transparan, serta menjamin pemerataan pendapatan dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat

4. Kesimpulan

Masa Dinasti Bani Umayyah (661-750 M) merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah seperti Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, dan Umar bin Abdul Azis, berbagai kebijakan ekonommi yang inovatif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat berhasil diterapkan. Khalifah Muawiyah memulai transformasi sistem pemerintahan menjadi monarki dan memperkuat administrasi negara, termasuk pengelolaan pajak dan percetakan mata uang. Abdul Malik melanjutkan dengan reformasi fiskal dan moneter yang menciptakan stabilitas ekonomi serta memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih adil. Sementara itu, Umar bin Abdul Azis dikenal dengan kebijakan kesejahteraan yang berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi dan memaksimalkan potensi zakat sebagai sumber pendapatan negara. Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memperkuat perekonomian Dinasti Umayyah, tetapi juga memberikan fondasi bagi sistem ekonomi Islam yang etis dan berkelanjutan.

Referensi

1. Al-Faruq, U., Noor, M. T. Z. M., Ningsih, S. S., Ardianto, M. A., & Priyana, T. K. (2024). Analisis Kondisi Ilmu Rasm Al-Qur'an Pada Era Modern. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(2), 101–105. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/relinesia>
2. Fadilla. (2019). Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 97–106. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.62>
3. Harahap, M. S. (2020). Sejarah Dinasti Bani Umayyah Dan Pendidikan Islam. *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 4(2), 21. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i2.86>
4. Hayati, S. (2019). Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Azis terhadap Kesenjangan Masyarakat Daulah Umawiyah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 19(1), 99–116. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art5>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3357>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

5. Hidayatulloh, M. H., & Khusnuddin. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Era Bani Umayyah dan Relevansi dengan Masa Sekarang. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 348–359. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2673>
6. Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 135–148. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.466>
7. Indah, M., Gaffar, A. A., & Sirajuddin. (2025). Sistem Ekonomi Bani Umayyah : Perkembangan dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Islam. *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(2), 345–361.
8. Ismail, A. R., & Arif, Z. (2025). Konsep Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani. *Journal on Education*, 07(2), 12067–12081.
9. Kirani, R., Firmansyah, nova wildan, & Mariyah, erina helda. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah. *Journal of Economics Bussines Ethic and Science Histories*, 1(1), 115–122.
10. Kusumastuti, A. S., & Ghozali, M. (2019). Konsep Welfare State Pada Kebijakan Umar Bin Abdil Aziz Sebagai Khalifah Bani Umayyah. *Annisa: Welfare State, Kebijakan, Khalifah Umar*, 6(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
11. Maghfuroh, N. L., Qanita, A., Ridwan, M., & Khusnudin. (2023). Ekspansi Perkembangan Ekonomi pada Masa Bani Umayyah dan Era Industri 5.0. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3(2), 125–140.
12. Nadila, Kurnia, E., & Siradjudin. (2023). Economics and Digital Business Review Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 298–302.
13. Nuha, F. J., Muharam, H. A., Ibnu, N., Zein, S., & Marlina, L. (2025). Kebijakan dan Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Umayyah. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(2).
14. Risma, Hamran, R. G., Siradjudin, & Nasrullah. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Daulah Abbasiyah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 6(1), 228–249. <https://doi.org/10.46870/jiat.v6i1.924>
15. Ruslan, & Marasabessy, H. (2017). Analisa Pola Distribusi Zakat Pada Masa Daulah Umayyah Dan Abbasiyah. *Dosen Tetap Prodi Muamalah STAI Asy-Syukriyyah*, 18, 132.
16. Samsunar, M., Sapa, N. Bin, & Lutfi, M. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Bani Umayyah : Suatu Tinjauan Sejarah Dan Implementasi Kebijakan Ekonommi*. 9(2), 228–237. <https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5871>
17. Saputra, M. R., & Sirajuddin. (2025). Kebijakan dan Prinsip Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah: Inspirasi Untuk Transformasi Ekonomi Masa Kini. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 11–12. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1397>
18. Wahab, F. (2023). Sejarah dan Perkembangan Dinasti Bani Umayyah Dalam Dunia Islam. In *Jurnal Pusaka* (Vol. 13, Issue 2). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
19. Yani, A. (2022). Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq. *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 1(1), 33–44.
20. Zuhroh, I. (2023). Menapaki Jejak-Jejak Kemajuan Ekonomi Islam Pada Masa Dinasti Umayyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1329–1334. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7582>